

lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengeluarkan peraturan sebagai atas pelaksanaan hibah setelah diterbitkannya Undang-Undang 32 Tahun 2014 sehingga diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat terutama pembudidaya ikan dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan dalam pengurusan sertifikat berbadan hukum. Ketiga, memberikan sosialisasi secara intensif dan simultan bagi kelompok masyarakat pembudidaya ikan.

## **B. Saran**

Dari simpulan di atas, sehubungan dengan pembahasan tesis ini saran yang dapat penulis sampaikan sekiranya dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan hibah kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya intensitas dalam memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat pembudidaya utamanya seiring telah diterbitkannya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Perlunya sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati dan atau peraturan lainnya yang bertujuan pedoman dalam penyelenggaraan dan atau pelaksanaan bantuan hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anton Baker dan Ahmad Choris Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cet. 1, Kanisius, Yogyakarta.
- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Arab Indonesia*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet Ke 1*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ateng Syafruddin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ateng Syafrudin, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung.

- Amran Muslim, 1986, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Burhan Bungin, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Bandung.
- B.C Smith, 1985, *Decentralization The Teritorial Dimension of The State*, Geoge Allen & Unwin (publisher) Ltd. North Sydney, Autralia.
- Bayu Suryaningrat, 1980, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Aksara Baru, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Bandung.
- Budi Agustono, 2005, *Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara : dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta.
- Badrul Munir, 2003, *Perencanaan Anggaran Kinerja Menangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Samawa Center, Yogyakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bayu Suryaningrat, 1981, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah/Daerah*, Aksara Baru, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Buku Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013
- C. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Chuzaimah T. Yanggo dan A Hafidz Anshory, 2001, *Problematika Hukum Islam* III, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014, *Petunjuk Teknis Denfarm Budidaya Berbasis Manajemen Kelompok Melalui Tugas Pembantuan*.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010, *Profil Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Perikanan Budidaya*.
- Gabril Amin Silalahi, 2003, *Metode dan Study Kasus*, Citra Media, Sidoarjo.
- Hadjon dkk, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2006, *Fikih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Helmi Karim, 1997, *Fikih Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Irwan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- J. Wajong, 1975, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Krisna D. Darumusrti dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjoro Poerbopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Cipta, Jakarta.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2010, *Kelayakan Usaha Budidaya Rumput Laut*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Budidaya, 2012, *Metode Pengumpulan Data Statistik Perikanan Budiyyaya*, Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan, Jakarta.

- Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta, 1992.
- M. Idris Ramulyo, 1994, *Pernbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 10.
- Marzuki, 1997, *Pengaturan Hak Penyelidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Fungsi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PPS UNPAD, Bandung.
- Marzuki Lubis, 2011, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Solly. Lubis, 1975, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.
- M. Solly Lubis, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Meriam Budiardjo, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Makmur dan Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh Kusnardi dkk, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia-Seri Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Ghufron H. Kordi K, 1994, *Budidaya Air Payau*, Dahara Prize, Semarang.
- Nasution, 2003, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cetakan Ke-4, Bumi Aksara, Bandung.
- Menteri Dalam Negeri, 1992, *Implementasi Demokrasi Pancasila Di Dalam Melaksanakan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke 8, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Nasrun Haroen, 2000, *Fikih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan, 2010, *Buku Saku*, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Jepara
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1979, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rony Hnittyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachmad Syafi'i, 2006, *Fikih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- R.D.H. Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sayyid Sabig, 1997, *Fikih Sunnah Jilid 14 (terjemah)*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Sujamto, 1993, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sarundanjang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Sri Sumantri dan Bintang R Saragih, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 Tahun Kembali Ke Undang undang Dasar 1945)*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soehino, 1997, *Hukum Tata Negara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2004, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sarjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tjahja Supriatha, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung.
- Victor M. Situmorang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahbah Az-Zuhayly, 2008, *Fiqhul Islami Waadillatuhu*, Juz IV, Darul Fikr, Damascus.
- Yudoyono Bambang, 2001, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Yosep Riwukaho, 1980, *Otonomi yang Titik Beratnya di Letakkan Pada Daerah TK II*, UGM, Yogyakarta.
- Y.W. Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yasin dan Solikhul Hadi, 2008, *Fiqih Ibadah*, Pusat Pengembangan Sumber Belajar (PPSB) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus.
- Yeremias T. Kebun, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 651/KEP-DJPB/2014 tentang Petunjuk Teknis Demfarm Budidaya Ikan Berbasis Manajemen Kelompok Melalui Tugas Pembantuan Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perdoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.